



Membangun model pengelolaan hutan dengan
skema HKm
di kawasan Ili Wengot



LAPORAN AKHIR PROGRAM
(Februari 2016 s/d Januari 2017)

BAB I
INFORMASI PROGRAM

Wilayah Pendanaan : Flores dan koridor laut Solor Alor
KBA : Ili Wengot
Strategic Direction(s) : Pengelolaan Sumber Daya Alam Darat Berbasis Masyarakat
Nama Proyek : Membangun model pengelolaan hutan dengan skema HKM
Nomor Laporan : 02
Periode waktu : Februari 2016 – Januari 2017 (12 bulan)
Disampaikan oleh : Thomas Uran (Koordinator program)
Tanggal : 10 Februari 2017

Hibah CEPF:

(a) dalam USD : _____
(b) dalam mata uang lokal (Rp) : 259.110.000

Kontribusi Mitra: berupa *In kind* meliputi alokasi staff, kantor dan perlengkapan pendukung kerja

Kontribusi donor (program) lain (jika ada): -

Periode program: Februari 2016 s/d Januari 2017

Lembaga pelaksana (mitra): Yayasan Ayu Tani Mandiri

BAB II RINGKASAN



Kondisi & perkembangan program secara umum

Secara umum, program “*Membangun model pengelolaan hutan dengan skema HKm di kawasan Iliwengot*” sangat bermanfaat untuk keselamatan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah ini. Kegiatan yang dilakukan selama satu tahun telah mendukung tercapainya dua out put yang direncanakan yaitu : *Terbangunnya organisasi petani pengelola HKm di KBA Iliwengot yang mandiri dan professional* dan *Petani pengelola HKm di KBA Ili Wengot menerapkan praktek pertanian yang ramah lingkungan*.

Untuk mencappai hasil pertama : *Terbangunnya organisasi petani pengelola HKm di KBA Iliwengot yang mandiri dan professional*, kami melaluinya dengan kegiatan penilaian kapasitas kelompok. Dengan kegiatan ini, petani menemukan kelemahan pada organisasi LPMA yakni mobilisasi anggota untuk kelola HKm belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan karena sebagian pengurus sudah tidak aktif karena merantau, dan sebagian pengurus sudah tua (berusia di atas 70 tahun). Kedua problem ini disebabkan karena LPMA belum punya sistem yang mengatur tentang pergantian pengurus. Dari hasil penilaian kapasitas ini telah pula menyadarkan petani tentang pentingnya aturan dan batasan waktu pergantian pengurus, juga termasuk revisi bentuk organisasi.

Dengan beberapa kondisi ini, melalui kegiatan lokakarya petani tingkat hampan berhasil menetapkan bentuk organisasi LPMA menjadi Koperasi. Dengan berubahnya bentuk organisasi ini maka dalam lokakarya berhasil memilih pengurus yang disesuaikan dengan struktur koperasi.

Selain itu, dalam lokakarya berhasil merumuskan draft Anggaran Dasar Koperasi. Draft ini selanjutnya digodok dan diselesaikan oleh pengurus untuk urusan legalitas koperasi.

Lokakarya kawasan membahas juga soal kemandirian financial. Ada dua pilihan yaitu melalui *pengumpulan simpanan anggota* dan *pemasaran bersama komoditi*. Simpanan anggota terdiri dari : Simpanan Pokok (SP), Simpanan Wajib (Yuran) dan Simpanan Usaha Tani (SUT : bersifat sukarela). SP senilai Rp.25.000/anggota, SW senilai Rp.1000/anggota/bulan, dan SUT disesuaikan kemampuan anggota.

Alasan lain sehingga petani belum maksimal untuk menanam aneka tanaman komoditi karena petani belum paham secara benar tentang kebijakan HKm. Oleh karena itu, kegiatan *penguatan kapasitas petani* yang diusul dalam kerja sama ini diisi dengan *penyadaran tentang konsep dan kebijakan HKm*. Kesepakatan yang dibangun melalui kegiatan ini yaitu semua petani wajib tanam tanaman yang bisa diusahakan sendiri di antaranya : kelapa dan kemiri.



Untuk mencapai output 2 : *Petani pengelola HKm di KBA Ili Wengot menerapkan praktek pertanian yang ramah lingkungan* maka diawali dengan kegiatan fasilitasi rencana kebun.

Fasilitasi rencana kebun dilakukan di tingkat petani secara desa, dan secara hamparan. Demi motivasi petani maka hari pertama dilakukan sharing pengalaman oleh Direktur PT. Rerolara, sebuah perusahaan di sector perkebunan. Hasil dari fasilitasi ini, **301 petani sudah memiliki dokumen rencana kebun. Yang belum memiliki dokumen rencana kebun sebanyak 121 petani.** Adapun kebutuhan petani dalam dokumen rencana kebun terdiri atas : **Kelapa : 41.984, Kopi/kakao : 83.968, Pinang : 65.600, Rambutan: 820, Durian : 656, Pete : 1.640.**

Sebagai lanjutan kegiatan rencana kebun yaitu pengembangan pembibitan. Bibit yang berhasil disiapkan untuk ditanam musim tanam tahun 2016 : Kopi 8.000 anakan, Kakao 3.500

anakan. *Jumlah 11.500 anakan.* Ratarata 86 anakan /petani. Tanaman Swadaya petani : Kelapa : 256 anakan.

Capaian-capaian penting yang berhasil diwujudkan

Secara umum, capaian penting yang dihasilkan selama tahun 2016 adalah : 171 Ha dari dari 214 Ha (80%) ditanami aneka tanaman, namun masih dalam jumlah terbatas. Rata-rata penanaman setiap kebun mencapai 217 phn / 1 Ha (30%). Tanaman strata atas berupa tanaman kelapa dan kemiri. Sumber bibit tanaman kelapa dan kemiri merupakan swadaya petani. Tanaman strata menengah berupa kopi dan kakao yang merupakan intervensi dari proyek. Di beberapa daerah aliran sungai ditanami tanaman bambu.

Jumlah petani yang menerima manfaat langsung dari program : Desa Hikong 194 kk tani dari 451 kk tani (43%), Desa Boru Kedang 203 kk tani dari 264 kk tani (77%). Secara administrasi LPMA sudah berbentuk Koperasi namun belum terdaftar di Dinas / instansi terkait. Sudah terbentuk 9 kelompok kerja (1 Poktan di Desa Boru, 3 Poktan Desa Boru Kedang, 5 Poktan di Desa Hikong). Masing-masing Poktan sudah memiliki struktur kepengurusan dan sudah punya aturan kerja kelompok.

Dari aspek budidaya, tersendatnya pengelolaan yang berorientasi pelestarian hutan disebabkan karena belum semua petani terorganisir dalam kelompok kerja, kurang lebih 40% . selain itu juga disebabkan karena keterbatasan kemampuan untuk mengakses bibit dari sumber lain. Pemerintah Desa dari ketiga desa asal petani pengelola (Desa Hikong, Boru dan Boru Kedang) belum optimal untuk pendampingan dan dukungan biaya. Pemerintah desa masih sebatas terlibat dalam struktur Pengurus dan Pengawas Koperasi yang melakukan kegiatan monitoring di kebun petani.

Jumlah petani yang menanam selama tahun 2016 yang didukung program sebanyak 134 petani dari 421 orang (32%). Jenis tanaman yang ditanam : Kopi 8.000 anakan, Kakao 3.500 anakan. *Total 11.500 anakan.* Ratarata penanaman 86 anakan /petani. Sedangkan tanaman hasil swadaya petani yaitu Kelapa sebanyak 256 anakan. Tanaman yang ditanam sebelum tahun 2016 terdiri dari : Kelapa 7.696 anakan, Pinang : 400 anakan, Kemiri 1.417 pohon, Pete 445 pohon, Durian 8 pohon, Rambutan 44 pohon, Pala 8 pohon, *Total : 10.018 pohon.* Dengan demikian total yang sudah ditanam di kawasan sebanyak 21.774 pohon/anakan.

Perubahan asumsi dan resiko, serta respon/tindakan lembaga

Selama satu tahun program kerja sama ini dijalankan, belum ditemukan adanya kemungkinan resiko yang menghambat terlaksananya program. Para pihak sangat menerima program yang ada. Masyarakat petani merasa bersyukur bahwa dengan adanya program ini maka bisa membantu mempercepat tercapainya tujuan pengelolaan HKM.

Namun demikian, tersendatnya pengembangan program di wilayah ini salah satunya disebabkan karena sebagian petani masih bertahan dengan tanaman semusim (padi dan jagung), sulitnya petani mendapatkan bibit tanaman umur panjang, dan rendahnya pengetahuan dan ketrampilan di tingkat petani. Hal ini juga disebabkan karena belum optimal dukungan Pemdes dan pihak lain dalam hal financial, motivasi dan pendampingan teknis. Sedangkan factor lain yaitu pengurus LPMA belum optimal menjalankan fungsi. Struktur baru dibentuk sehingga belum bisa melakukan tugas dan fungsi secara optimal.

Untuk mengatasi temuan-temuan ini maka dalam keseluruhan program, lembaga selalu mengutamakan kerja sama para pihak. Pemdes dan BPD mulai dilibatkan dalam berbagai kegiatan di tingkat petani. Demikian halnya dengan Pemkab Kabupaten Flores Timur. Setelah kewenangan pengelolaan hutan menjadi urusan pemerintah propinsi maka komunikasi intens masih sebatas dengan personalia mantan Kabag Pentagunaan Hutan, juga dengan Bupati Flores Timur.

Kaitan antara capaian saat ini dengan (kontribusi terhadap) tujuan akhir (proyek)

Adapun tujuan akhir dari proyek ini adalah : *Pengelolaan kawasan Ili Wengot melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) mendukung kelestarian hutan dan penghidupan masyarakat petani.*

Dengan capaian sementara yang ada saat ini, mulai mengarah pada terwujudnya tujuan tersebut di atas. Secara umum, capaian penting yang dihasilkan selama tahun 2016 adalah : 171 Ha dari 214 Ha (80%) ditanami aneka tanaman. Penanaman masih dalam jumlah terbatas. Rata-rata penanaman setiap kebun mencapai 217 phn / 1 Ha (30%).

Tanaman yang ditanam pada tahun awal program yaitu tanaman kelapa dan kakao, di hamparan Baologun seluas 50 Ha sudah memproduksi. Sebagai persiapan untuk memperkuat posisi tawar petani maka penguatan kelembagaan sudah mulai dibangun. Koperasi petani menjadi bagian penting demi memperkuat posisi tawar dimaksud.

Sebagai persiapan untuk pemasaran bersama maka ditetapkan modal swadaya Koperasi Tani Nian Ue Wari melalui simpanan pokok (SP) senilai Rp.25.000/anggota, simpanan wajib (SW) senilai Rp.1000/anggota/bulan, dan simpanan usaha tani/ sukarela (SUT) disesuaikan kemampuan anggota.

BAB III
CAPAIAN



A. Objective 1 : *Terbangunnya organisasi petani pengelola HKm di KBA Ili Wengot yang mandiri dan profesional.*

Indikator :

- *Organisasi pengelola mampu mengorganisir dan memobilisasi anggota kelompok untuk melakukan pengelolaan sesuai aturan dan kesepakatan*
- *Pemerintah desa mengalokasikan anggaran desa untuk mendukung rencana kerja implementasi HKm*

Objective telah dicapai oleh program dengan terpenuhinya indikator sebagai berikut :

- 1) *Organisasi pengelola mampu mengorganisir dan memobilisasi anggota kelompok untuk melakukan pengelolaan sesuai aturan dan kesepakatan.*

Secara administrasi LPMA sudah berbentuk Koperasi walaupun belum terdaftar di Dinas terkait (Dinas Koperasi dan UKM) dan Kementerian Koperasi RI.

Untuk memudahkan mobilisasi pengelolaan maka dibentuk kelompok kerja. Sudah terbentuk 9 (Sembilan) kelompok kerja. 1 kelompok kerja di Desa Boru, 3 Pkelompok kerja di Desa Boru Kedang, dan 5 kelompok kerja di Desa Hikong).

9 kelompok kerja ini sudah memiliki struktur kepengurusan, dan sudah punya aturan kerja kelompok.

- 2) *Pemerintah desa mengalokasikan anggaran desa untuk mendukung rencana kerja implementasi HKM.*

Pemerintah dari Desa Boru, Desa Hikong dan Boru Kedang telah terlibat dalam struktur kepengurusan Koperasi LPMA. Darius Don Boruk, Kepala Desa Boru Kedang sebagai Wakil Ketua. Benediktus Baran Liwu, Kepala Desa Boru dan Deodatus, Kepala Desa Hikong sebagai Pengawas.

Indikator 1 dipenuhi melalui capaian

Penguatan kelembagaan petani pengelola diawali dengan kegiatan penilaian kapasitas kelompok. Kegiatan penilaian kapasitas kelompok yang terlaksana di tiga desa dengan akumulasi peserta mencapai 167 petani. Total petani pengelola di kawasan ini berjumlah 421 orang. Prosentase capaian 39,66%. Sangat jauh dari target yang direncanakan yaitu 80%. Dalam evaluasi di tingkat pengurus menyebutkan bahwa hal ini disebabkan karena petani pada umumnya masih melihat areal HKM bukan sebagai hutan lindung dalam penguasaan negara. Sebagian besar petani masih menganggap areal itu adalah tanah hak milik yang diturunkan oleh leluhur. Ini menjadi problem dasar sehingga menghambat implementasi pengelolaan yang berorientasi menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan hutan lindung. Jumlah petani yang terlibat dalam kegiatan penilaian kapasitas terdiri dari : Desa Boru Kedang 64 orang, Desa Hikong 63 orang, Desa Boru : 40 orang.

Dalam penilaian kapasitas kelompok juga ditemukan factor penghambat lain yaitu LPMA belum punya system pergantian pengurus. Beberapa Pengurus LPMA sudah tua usianya, di atas 70 tahun. Sebagian lagi merantau karena tekanan ekonomi. LPMA baru sebatas sebagai asosiasi masyarakat adat. Hal ini akan berdampak apabila masa berlaku HKM berakhir. Apabila system pergantian pengurus belum ditata maka dengan sendirinya berdampak pada berakhirnya HKM karena tidak ada pengurus yang mengurus permohonan lanjutan HKM. Dampak berikutnya adalah ekonomi masyarakat petani di wilayah ini semakin rentan.

Banyak di antara mereka (petani pengelola) belum paham akan konsekuensi apabila lahan diterlantarkan. Pola bertani tebas – bakar dan pindah kebun masih diterapkan masyarakat petani di wilayah ini. Sejak dikeluarkan IUP HKm, masyarakat sudah merasa nyaman karena belum ada control yang memadai dari Pemerintah selaku pemberi IUP HKm. Kebebasan semacam ini akan sangat merusak kawasan bila tidak diintervensi secara dini. Padahal, fungsi hutan lindung yang ditetapkan pemerintah sudah sangat wajar. Alasan utamanya yaitu masyarakat di wilayah ini menggantungkan kebutuhan akan air bersih yang bersumber di dalam kawasan ini. Penguatan kapasitas anggota menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Karena salah satu faktor penghambat belum efektifnya implementasi HKm yaitu petani belum paham tentang HKm maka kegiatan *pelatihan dinamika kelompok* dilakukan dengan memberikan penyadaran tentang aturan HKm. Kegiatan penyadaran tentang regulasi HKm dilaksanakan secara terpisah di tiga desa. Desa Boru, terlaksana tgl 22 Februari 2016 diikuti 40 peserta), Desa Boru Kedang terlaksana tgl 24 Februari 2016 melibatkan 62 peserta dan Desa Hikong terlaksana tgl 27 Februari 2016 melibatkan 60 peserta. Tingkat keterlibatan perempuan sangat rendah. Kegiatan di tiga desa hanya melibatkan 13 orang perempuan.

Melalui kegiatan penyadaran regulasi HKm ini telah membantu menyadarkan petani. Dengan demikian petani pengelola bertekad untuk segera mewujudkan pengelolaan sesuai tuntutan regulasi. Untuk itu maka kegiatan berikutnya adalah pengorganisasian petani dalam kelompok kerja. Telah terorganisir 9 kelompok kerja. Desa Boru 1 kelompok kerja, Desa Boru Kedang 3 kelompok kerja, dan Desa Hikong 5 kelompok kerja. Adapun nama kelompok kerja dengan kepengurusan sebagai berikut Desa Hikong : Napung Gunit dengan ketua : Paskalis Kuma, Watu tetor, ketua : Lambertus Witin, Poing pening, ketua : Maria Aurelia, Watu Denak, ketua : Nikolaus Gilo, Koli Wojan, ketua: Antonius Lado. Desa Boru : Kelompok Lelebo, ketua : Gabriel Goju> Desa Boru Kedang : Kelompok Nian Ue Wari ketua : Yosep Gate, Wolo Mage, ketua : Agus Beda, Ma Mai, ketua Romanus Roma Liwu.

Penyusunan rencana kerja untuk kelompok di Desa Boru tgl 3 April 2016 melibatkan 56 orang, Desa Boru Kedang 5 April 2016 melibatkan 66 orang, Desa Hikong 7 April 2016 melibatkan 71 orang dari 5 kelompok tani. Satu target capaian yang menjadi fokus dari program kerja di tingkat kelompok yaitu percepatan penanaman areal HKm dengan komoditi berprospek ekonomi dan pemasaran bersama. Komoditi unggulan yang akan dikembangkan adalah : Kelapa, Kakao, Kopi, Pala dan aneka buah. Untuk konservasi di sepanjang sungai dan hutan adalah bambu. Dalam rencana kerja masing-masing kelompok menetapkan jadwal kerja bergilir. Dengan sistem ini diharapkan mempercepat tujuan menghidupkan kembali lahan.

Setelah terbentuknya kelompok kerja dan rencana kerja di tingkat kelompok maka di lanjutkan dengan kegiatan lokakarya petani di tingkat kawasan. Lokakarya petani tingkat kawasan terlaksana tanggal 8 April 2016 s/d 9 April 2016. Lokakarya selama dua hari ini telah menghasilkan : 1). Petani pengelola bersepakat untuk mengalihkan LPMA dari asosiasi masyarakat adat menjadi koperasi. 2) Merumuskan draft Anggaran Dasar Koperasi Petani Nian

Ue Wari untuk urusan legalitas akta notaris.3) Memilih pengurus koperasi, Rencana kerja pengurus di tingkat hamparan. Lokakarya selama dua hari melibatkan 73 orang. Saat ini Koperasi Tani Nian Ue Wari sudah memiliki legalitas berupa Akta Notaris Koperasi No 16, tanggal 25 Juli 2016.

Struktur kepengurusan Koperasi Nian Ue Wari, juga sebagai pengurus kawasan terdiri dari : **Pengurus** : Ketua: Yoseph Gate Weran, Wakil Ketua 1: Rudolfus Rede, Wakil Ketua 2 : Lorens Useng SVD (tokoh agama/Pastor), Sekretaris 1: Darius Don Boruk (Kepala Desa Boru Kedang), Sekretaris 2: Marianus Dare, Bendahara : Siprianus Blolon. **Pengawas** : Pengawas 1: Romanus Rona, Pengawas 2 : Agustinus A. Deodatus (Kepala Desa Hikong), Pengawas 3: Benediktus Baran Liwu (Kepala Desa Boru).

Aturan kelompok tersusun dengan capaian petani yang terlibat dalam kegiatan mencapai 46% dari 421 kk petani. Boru 54, Borukedang 73 orang, Hikong 67 orang. Total 194 orang. Point penting dalam aturan yaitu demi mewujudkan spirit dasar HKm yaitu *hutan lestari, ekonomi petani pengelola meningkat*. Untuk mencapai target ini maka petani di setiap kelompok menetapkan aturan. Di antaranya : semua petani wajib terlibat dalam kelompok, terlibat dalam system kerja bergilir, dan wajib menyusun rencana penanaman.

Untuk memperkuat kelembagaan petani maka upaya yang dilakukan adalah penguatan kapasitas pengurus. Pertemuan regular pengurus dengan anggota menjadi hal penting yang dilakukan. Selama satu tahun program dilakukan pertemuan regular pengurus bersama anggota sebanyak 4 kali. Adapun pertemuan itu dilaksanakan di 3 kali di tingkat desa, dan 3 kali di tingkat kawasan. Pertemuan di tingkat kawasan lebih fokus untuk melihat kemajuan kerja petani pada kebunnya masing-masing.

Indikator 2 : *Pemerintah desa mengalokasikan anggaran desa untuk mendukung rencana kerja implementasi HKm .*

Pelibatan pemerintah desa dalam program ini sudah mulai dilakukan. Kepala Desa dan BPD dari Desa Hikong, Boru dan Boru Kedang dipilih oleh petani anggota dalam forum lokakarya kawasan sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi LPMA. Darius Don Boruk (Kepala Desa Boru Kedang) sebagai Pengurus yang menangani Sekretaris 1, Marianus Dare (Anggota BPD Desa Hikong) sebagai Sekretaris 2, Romanus Rona (anggota BPD Desa Boru Kedang) sebagai anggota Pengawas Koperasi LPMA, Agustinus A. Deodatus (Kepala Desa Hikong) sebagai anggota Pengawas Koperasi LPMA, dan Benediktus Baran Liwu (Kepala Desa Boru) sebagai anggota Pengawas.

Mengefikkan peran pemerintah desa, dalam tahun 2016, dilakukan monitoring secara terpadu pada kepala desa dan BPD yang terikat dalam struktur Pengurus dan Pengawas melakukan monitoring ke hamparan : Tige Gulo, Watu Ruha, Terang Gete, dan Wolo Mage. Rekomendasi yang diberikan Tim Monitor yaitu perlu ada gerakan penanaman secara efektif untuk empat hamparan ini. Untuk itu maka perencanaan kebun diprioritaskan pada petani di empat hamparan dimaksud.



B. Output 2: *Petani pengelola HKm di KBA Ili Wengot menerapkan praktek pertanian yang ramah lingkungan.*

Adapun indicator dari Output ini adalah : *50% dari 422 petani pengelola HKm telah menanam masing-masing 200 pohon/kk dari minimal 5 jenis tanaman, sampai dengan bulan XI.*

Adapun capaian yang dihasilkan pada tahun 2016 ini sebanyak 134 petani dari 421 orang (32%) yang menanam. Jenis tanaman yang ditanam terdiri dari : Kopi 8.000 anakan, Kakao 3.500 anakan dan kelapa 256 anakan. Jumlah yang ditanam tahun 2016 ini sebanyak 11.756 anakan. Ratarata 87 anakan /petani.

Adapun indicator ini dicapai melalui :

a. Perencanaan kebun :

Fasilitasi rencana kebun dilakukan di tingkat petani secara desa, dan di tingkat hamparan. Hasil dari fasilitasi ini, 301 petani sudah memiliki dokumen rencana kebun. Yang belum memiliki dokumen rencana kebun sebanyak 121 petani. Prosentase capaian 71 %. Melampaui dari target 50%. Adapun kebutuhan petani dalam dokumen rencana kebun terdiri atas : *Kelapa : 41.984, Kopi/kakao : 83.968, Pinang : 65.600, Rambutan: 820, Durian : 656, Pete : 1.640.* Kebutuhan setelah dikurangi yang sudah tanam : *Kelapa : 41.984, Kopi/kakao : 83.968. Pinang : 65.600, Rambutan: 820 anakan, Durian : 656 anakan, dan Pete : 1.640.*

b. Pengembangan pembibitan tanaman kayu dan buah

Pembibitan dilaksanakan di tiga desa. Di Desa Boru Kedang satu tempat ;pembibitan, di Desa Hikong sebanyak 3 tempat pembibitan dan Desa Boru sebanyak 1 tempat pembibitan.

Sebagai antisipasi kegagalan maka disepakati untuk disiapkan oleh penangkar benih dalam hal ini PT. Rerolara. Pelibatan panangkar benih juga ada kaitan dengan sumber benih yang diandalkan di wilayah ini terkhusus benih kopi. Total pembibitan yang sudah ada sebanyak 32.000 anakan. Yang terdiri dari : Kopi : 9.000 anakan, Pinang 2000 anakan, Kelapa : 1000 anakan, dan sengon 19.000 anakan.

Mengakhiri program kerja sama, dalam kegiatan evaluasi pada Sabtu, 7 Januari 2017 telah menemukan tingkat kemajuan program. Namun masih ada yang perlu mendapat perhatian demi kemandirian dan keberlanjutan program di tingkat petani. Adapun rekomendasi sbb :

1) *Aspek kelembagaan petani :*

Motivasi dan pengorganisasian petani secara menyeluruh (untuk petani yang belum terlibat dalam Kelompok Kerja 120 orang), Pengontrolan terhadap pelaksanaan aturan/kesepakatan oleh Pengurus LPMA, Pengurusan legalitas koperasi tani LPMA Nian Ue Wari, Pembuatan data base keanggotaan dalam system komputerisasi, Penguatan kapasitas Anggota, kapasitas Pengurus dan Pengawas Koperasi Tani Nian Ue Wari, Penyusunan rencana strategis (Renstra) , Penyusunan rencana bisnis , Pertemuan regular pengurus, motivasi dan mobilisasi saham anggota (Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Usaha Tani), lobby dan negosiasi dengan pemerintah, lembaga keuangan dan sector swasta, Pemeriksaan rutin administrasi oleh Badan Pengawas, Menyelenggarakan rapat rutin pengurus, Menyelenggarakan rapat rutin pengawas, Menyelenggarakan rapat gabungan Pengurus dan Pengawas, Lokakarya penyusunan peran Pengurus, Pengawas dan Pengurus Poktan, Motivasi dan ujicoba pemasaran bersama, Pengembangan unit pengolahan bersama pasca panen hasil komoditi (kelapa dan kakao), Menyelenggarakan Rapat Akhir Tahun yang melibatkan semua unsur (pengurus, pengawas, anggota dan para pihak).

2) *Aspek teknis pengelolaan :*

Pengembangan pembibitan tanaman secara bersama, Penggalangan dana untuk mendukung pembibitan, Pendampingan teknis budidaya dan perawatan tanaman, Melanjutkan kegiatan perencanaan kebun untuk 120 petani yg belum punya dokumen rencana kebun, Pelatihan pengendalian hama tanaman kakao (temuan evaluasi), Penyusunan Perdes bersama tiga desa untuk pengelolaan (konservasi) perlindungan hutan (usulan evaluasi), Konservasi pada area tertentu (mata air, batang kali, hutan adat) dengan tanaman bamboo/beringin, Monitoring / pengawasan pengelolaan oleh Pengurus Koptan Nian Ue Wari kepada petani di tingkat hamparan, Fasilitasi para pihak untuk pemantauan dan pengawasan pengelolaan.

BAB IV
PERUBAHAN



1. Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas (tidak perlu diisi apabila program TIDAK menysasar pada Arahan Strategis 1)

Nama Spesies Prioritas	Ancaman	Status	Dokumen verifikasi
	(perburuan, perdagangan)	(jumlah ancaman turun dengan prosentasi tertentu pada saat akhir program)	(Survey/monitoring baseline dan endline)

2. Peningkatan pengelolaan terhadap KBA

Nama KBA	Bentuk Peningkatan Pengelolaan KBA	Luas (bagian) KBA yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi

Ili Wengot / IDN 305	Mendukung pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan dan koridor prioritas.	214 Ha	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.10/Menhut-II / 2011. Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 215 Tahun 2011
----------------------	--	--------	--

3. Perlindungan kawasan (formal protected area)

Nama Kawasan	Bentuk Perlindungan Kawasan	Luas Kawasan/Tahun Penetapan	Dokumen Verifikasi
Ili Wengot / IDN 305	Hutan Lindung	12.960 Ha Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 124/kpts-II/90. Tanggal 23 Maret 1990.	

4. Penerima manfaat

a. Karakteristik penerima manfaat (*silahkan tera checklist pada tiap kolom yang relevan*)

	Jenis Komunitas							
Nama Komunitas	Ekonomi Subsisten	Small landowner	Masyarakat	Pastoralists	Recent Komunitas	Lainnya	Ukuran Komunitas Penerima Manfaat	

									50 sampai 250 jiwa	251 sampai 500 jiwa	501 sampai 1000 jiwa	Diatas 1000 jiwa
Boru	V	V	V						V			
Boru Kedang	V	V	V						V			
Hikong	V	V	V						V			

b. Jumlah penerima manfaat

Jenis Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat (Laki-Laki)	Jumlah Penerima Manfaat (Perempuan)
Meningkatnya akses untuk air bersih		
Meningkatnya ketersediaan pangan	2.242	2.925
Meningkatnya akses ke sumber energi (listrik)		
Meningkatnya akses layanan publik (mis. Kesehatan, pendidikan dll.)		
Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim		
Kepemilikan lahan yang jelas		
Pengakuan atas kearifan lokal		
Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk		

pengambilan keputusan di pemerintahan		
Peningkatan akses atas jasa lingkungan		
Pelatihan (sebutkan jenis pelatihan yang didapat oleh penerima manfaat)		
Lain-lain		
Total Penerima Manfaat		

5. Regulasi/kebijakan lokal

Nama Regulasi/Kebijakan	Ruang Lingkup (nasional, lokal, desa)	Topik	Hasil yang Diharapkan

6. Jaringan kerja/forum multipihak

(jaringan atau kemitraan yang terbentuk sebagai hasil dari program yang dilaksanakan. Jaringan atau kemitraan ini berkaitan dengan capaian program, contoh : forum pengelolaan daerah tangkapan air, yang bertujuan sebagai forum komunikasi dan kerja bersama parapihak dalam pengelolaan daerah tangkapan air.)

Nama Jaringan/Kemitraan	Ruang Lingkup (nasional, lokal)	Tujuan Penetapan	Tahun Penetapan
Koperasi Tani Nian Ue Wari	Lokal	Untuk mobilisasi percepatan pengelolaan hutan	2016

7. Bentang alam produktif

Nama Bentang Alam Produktif	Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktif	Luas (bagian) Bentang Alam Produktif yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi

BAB V
PEMBELAJARAN



Isu	Keberhasilan/Kurang berhasil	Faktor Penyebab	Dampak	Rekomendasi
Hasil : a. Perubahan pengetahuan b. Perubahan sikap c. Perubahan perilaku	Petani sadar bahwa HKm adalah hak yang terberi, bukan hak milik. Kemauan untuk kelola sesuai aturan. Mau diorganisir secara baik dalam wadah Koperasi Tani	Sosialisasi ulang tentang regulasi HKm	Mempercepat penanaman	Penguatan kelembagaan petani pengelola utk jeminan keberlanjutan secara mandiri
Proses : a. Perencanaan b. Pelaksanaan	Petani bisa menentukan sendiri jenis komoditi Kerja bergilir sudah	Karena ada dukungan dana Motivasi utk cepat	Semangat kerja meningkat Punya mimpi	Penguatan kelembagaan petani Pendampingan

	berjalan di tingkat kelompok tani Ada kesadaran untuk menerapkan praktek pertanian yang ramah lingkungan Ada kesadaran untuk melindungi hutan / konservasi DAS	sukses secara bersama.	utk cepat sukses sehingga menjadi tempat belajar	yang berkelanjutan
--	--	------------------------------	---	-----------------------

BAB VI
STATUS KEUANGAN

- a. Pemasukan : Rp. 246.154.500
- b. Pengeluaran : Rp. 111.376.250
- c. Saldo : Rp. - (12.632.149)